

## **BAB III**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini peneliti akan menggambarkan tentang proses pembangunan proyek LRT dalam perspektif demokrasi deliberatif. Dalam menganalisis pembangunan proyek LRT, peneliti menggunakan teori Jurgen Habermas sebagai alat analisis.

Proses pembangunan proyek LRT tersebut akan peneliti uraikan sehingga akan menjawab rumusan masalah yang pertama yaitu, keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan proyek LRT, dan yang kedua proses pembangunan proyek LRT dalam perspektif demokrasi deliberatif.

#### **A. Hasil**

##### **1. Keikutsertaan dan Keterlibatan Masyarakat**

Sebuah pembangunan adalah hasil dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dimana penggunaannya adalah seluruh masyarakat Indonesia dari semua golongan baik golongan atas maupun golongan menengah ke bawah dan ini pula yang menjadi tolak ukur keberhasilan dari fungsi dan manfaat pembangunan proyek tersebut.

Pembangunan yang dibangun oleh pemerintah harus memenuhi standar pembangunan dan tentunya harus memberikan manfaat bagi

masyarakat luas tidak hanya itu masyarakat juga bisa menikmati infrastruktur yang sudah dibangun oleh pemerintah.

Dari hasil proses wawancara yang peneliti lakukan terhadap Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang diwakili oleh Bapak Abdullah Rasyid di kantor DPRD Provinsi, terkait keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat serta penentuan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pembangunan LRT Kepala Sub. Bagian Persidangan mengatakan sebagai berikut :

*“Pemutusan proyek LRT dilakukan DPRD Provinsi Sumatera Selatan bersama Gubernur, dalam sidang diputuskan sarana dan prasara yang dibutuhkan dalam pembangunan proyek LRT,. Sebelumnya proyek LRT ini sudah ditawarkan ke seluruh Provinsi yang ada di Indonesia dan tidak ada satupun Provinsi yang menyanggupi kecuali Provinsi Sumatera Selatan, Pak Alex Noerdin menyanggupi proyek LRT untuk dibangun di Kota Palembang dan untuk keikutsertaan masyarakat tentu masyarakat mengetahui mengenai pembanguna LRT ini dan tidak semua masyarakat diundang dalam pemutusan ini hanya tokoh-tokoh tertentu saja, karena tidak mungkin Gubernur mengundang seluruh masyarakat Kota Palembang”<sup>1</sup>*

Namun hal yang berbeda disampaikan oleh Kabid. Perkeretaapian dan Pengembangan mengatakan sebagai berikut :

*“Masyarakat tentu dilibatkan tetapi keterlibatan masyarakat ini hanya sebatas membangun proyek LRT tidak dalam*

---

<sup>1</sup>Wawancara dengan Abdullah Rasyid., SH, M.Si Kepala Sub Bagian Persidangan, tanggal 02 September 2019, pukul 09.29 WIB di kantor DPRS Sumatera Selatan, di Jalan Kapten A. Rivai Palembang

*mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam membangun LRT, masyarakatnya terlibat dalam proses pengajaran LRT saja banyak tenaga kerja lokal yang bekerja dalam pembangunan proyek LRT ini seperti material besi, pasir dan tenaga kerja itu berasal dari masyarakat dan untuk keikutsertaan dalam membentuk sebuah keputusan itu tidak ada masyarakat hanya mengetahui saja bahwa akan dibangun proyek LRT di Kota Palembang.”<sup>2</sup>*

Pembangunan proyek LRT memang sudah selesai dan tentunya melalui beberapa proses dan tahapan perencanaan, namun dalam pengoperasiannya masih terjadi beberapa masalah seperti tunggakan listrik yang mencapai 189 juta karena tunggakan selama 6 bulan dan pihak Pemkot tidak mau membayar karena menurut manajer humas PT PLN SW2 JB Bakri mengatakan kendala tunggakan pembayaran tagihan listrik tersebut disebabkan belum adanya serah terima aset dari Waskita Karya selaku kontraktor LRT kepada Pemerintah Kota Palembang.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Wawancara dengan Ahmad Wahidin, SST., ST, MT Kabid Perkeretaapian dan Pengembangan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 16 September 2019, pukul 09.00 WIB, di kantor Dinas Perhubungan Sumatera Selatan, di Jalan Kapten A.Rivai Palembang

<sup>3</sup><http://palembang.kompas.com/read/2019/07/03/15454461/ini-alasan-pemkot-palembang-menunggak-tagihan-listrik-lrt> diakses tanggal 12 September 2019, Pukul 13.03 WIB

### Gambar 3.1

#### Berita Tentang LRT



Sumber : Internet, diakses pada 11 September 2019

Sedangkan pihak Waskita Karya sendiri mengatakan itu bukan tanggung jawab kami karena kami hanya membayar listrik untuk gerakan kereta, karena itu ada di RAB itupun hanya samapi Mei lalu.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup><http://news.detik.com/berita/d-460749/istrik-di-jalur-lrt-palembang-diputus-waskita-bukan-tanggung-jawab-kita> diakses pada 13 september 2019, pukul 13.09 WIB

## Gambar 3.2

### Berita Tentang LRT



Sumber : Internet, dikases pada 11 September 2019

Berikut penyampaian langsung Kabid. Perkeretaapian dan Pengembangan terkait berita ini :

*“Memang dalam pengeoperasioanlannya masih ada beberapa masalah itu wajar-wajar saja dikarenakan Poyek LRT ini kan baru setahun berjalan dan masyarakat juga masih perlu penyesuaian untuk menggunakan LRT karena kan yang namanya sesuatu yang baru itu perlu beradaptasi terlebih dahulu dengan lingkungan dan pembangunan ini juga begitu masyarakat perlu penyesuaian, pembangunan LRT ini kan dibangun oleh PT Waskita Karya selaku kontraktor pembangunanya dan*

*pembiayaannya juga oleh kontraktor dan dipindahkan kepada beban Negara”.*<sup>5</sup>

Dari penyampaian Bapak Ahmad Wahidin Kabid. Perkeretaapian dan Pengembangan penetapan dan proses pembangunan proyek LRT ini memang terbilang singkat namun masyarakat tetap harus menyesuaikan diri dengan pembangunan yang ada terutama pembangunan LRT.

## **2. Proses Pembangunan Proyek LRT**

Proyek LRT merupakan proyek yang dibangun untuk mendukung kesuksesan *Asian Game* 2018 di Kota Palembang Bapak Rasyid Kasubag. Persidangan DPRD Sumatera Selatan mengatakan bahwa keputusan pembangunan proyek LRT di Kota Palembang ditetapkan oleh DPRD dan Gubernur setelah proyek tersebut ditawarkan keseluruh provinsi yang ada di Indonesia dan tidak ada satu provinsi yang menyanggupi kecuali provinsi Sumatera Selatan.

Pada awalnya pemerintah Kota Palembang merencanakan membangun monorel dari bandara Udara Sultan Mahmud Badaruddin II ke kompleks olahraga Jakabaring sebagai alternatif transportasi umum karena berdasarkan penelitian yang ada kota Palembang akan mengalami macet total pada 2019 mendatang. Dalam rangka menyambut pesta olahraga

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Ahmad Wahidin, SST., ST, MT Kabid Perkeretaapian dan Pengembangan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 16 September 2019, pukul 09.20 WIB, di Jalan Kaptan A.Rivai Palembang

Asian Games 2018 di Palembang, rencana pembangunan monorel tersebut kemudian dibatalkan karena kesulitan mencari investor yang dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu serta proyek dianggap kurang menguntungkan. Monorel kemudian diganti dengan LRT yang dianggap lebih efektif.

Presiden Joko Widodo kemudian menandatangani Perpres Nomor 116 Tahun 2015 tentang percepatan penyelenggaraan kereta api ringan di Sumatera Selatan tanggal 20 Oktober 2015. Menurut Perpres, pemerintah menugaskan kepada PT Waskita Karya Tbk untuk membangun prasarana LRT meliputi jalur termasuk konstruksi jalur layang, stasiun dan fasilitas operasi. Pendanaan proyek di 2016 akan dibiayai oleh PT Waskita Karya dengan pembangunan dari Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II ke *Jakabaring Sport City*. Selanjutnya, pemerintah melalui kementerian Perhubungan akan mengalokasikan anggaran pembiayaan proyek tersebut pada APBN 2017 dan 2018.<sup>6</sup>

Pembangunan LRT ditargetkan selesai pada 2018 karena pada Tahun 2018 akan diselenggarakan kegiatan olahraga se-Asia yaitu *Asian Game 2018*, seperti yang disampaikan Kepala Sub. Bagian Persidangan sebagai berikut :

*“Pembangunan LRT ini dalam rangka untuk menunjang kegiatan olahraga terbesar se-Asia yaitu Asian Game 2018 karena kita*

---

<sup>6</sup>[http://id.wikipedia.org/wiki/Lintas\\_Rel\\_Terpadu\\_Palembang](http://id.wikipedia.org/wiki/Lintas_Rel_Terpadu_Palembang) diakses pada 26 Agustus 2019

*selaku tuan rumah dan menjadi tempat dilaksanakannya kegiatan ini maka kita harus memberikan yang terbaik, dan untuk dana pembangunan LRT itu sendiri dari APBN yang sudah dianggarkan oleh pemerintah, masyarakat harus bangga karena di tempat kita sudah ada LRT karena di kota-kota lain kan belum ada baru di Jakarta dan Palembang saja”.*<sup>7</sup>

Dari penjelasan Kepala Sub. Bagian Persidangan DPRD tersebut diharapkan LRT dapat memberikan manfaat pada saat kegiatan olahraga berlangsung, namun setelah kegiatan olahraga ini selesai maka kita masih tetap harus menggunakan fasilitas yang sudah dibangun oleh pemerintah tersebut karena tujuan utama yang diharapkan setelah *Asian Game* selesai adalah berkurangnya kemacetan dan kenyamananpun bisa kita rasakan.

Pendapat yang berbeda yang disampaikan oleh Kabid. Perkeretaapian dan Pengembangan mengenai pembangunan LRT di Kota Palembang yang memiliki tujuan dan manfaat bagi masyarakat Kota Palembang sebagai berikut :

*“LRT ini dibangun untuk menciptakan lingkungan yang sehat kita lihat volume perkapasitas jalan ini kalau tidak diterobos pakai LRT pasti akan macet, sekarang saja sudah macet mangkanya mobil itu harus dihentikan jangan terlalu banyak inputnya didalam negeri. Jadi memang LRT ini dibangun untuk melihat citra Kota Palembang ini lebih bagus menggunakan LRT”.*<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Abdullah Rasyid., SH, M.Si Kepala Sub. Bagian Persidangan, tanggal 02 September 2019, pukul 09.29 WIB di kantor DPRD di Jalan Kapten A. Rivai Palembang

<sup>8</sup>Wawancara dengan Ahmad Wahidin, SST., ST, MT Kabid Perkeretaapian dan Pengembangan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 16 September 2019, pukul 09.00 WIB, di Kantor Dinas Perhubungan di Jalan Kapten A.Rivai Palembang

Pembangunan LRT dibangun untuk menunjang suksesnya *Asian Game* 2018 bangunan LRT sendiri dibangun dari Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II ke *Jakabaring Sport City* (JSC) dengan panjang rel kereta mencapai 24,5 km dan keretanya memiliki panjang (termasuk alat perangkai) MC1, MC2 = ± 17.000 mm dan lebar badan kereta 2.650 mm (3 ft 6 in), dengan kecepatan rata-rata 40 km/h (25 mph) dan kecepatan tertinggi 80 km/h (50 mph).<sup>9</sup>

### Spesifikasi Umum

Total 8 Trainset

Per Trainset : 3 Kereta

Formasi : MC1 – T – MC2

Kecepatan Maks. (Desain) : 100 km/jam

Percepatan Maks. (Tare Load) : 1 m/s<sup>2</sup>

Percepatan Maks. (Normal Load) : 0.8 m/s<sup>2</sup>

Perlambatan Maks. (Normal Load) : 1 m/s<sup>2</sup>

Perlambatan Maks. (Tare Load) : 1.3 m/s<sup>2</sup>

**Tabel 3.1 Kapasitas Penumpang Per Trainset**

Uraian		MC1	T	MC2
Desain8 Orang/m <sup>2</sup>	Kursi	40	48	40

<sup>9</sup> [http://en.wikipedia.org/wiki/Palembang\\_Light\\_Rail\\_Transit](http://en.wikipedia.org/wiki/Palembang_Light_Rail_Transit) diakses pada 11 September 2019

	Terdiri	127	152	127
	Total	167	200	167
Total Penumpang				534

Panjang T : 17.000 mm

Panjang MC1/MC2 : 17.000 mm



Panjang total rangkaian : ± 51.000 mm

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan

LRT sudah hampir 1 tahun lebih beroperasi, adapun stasiun pemberhentiannya berjumlah 13 (tiga belas) stasiun yaitu stasiun Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II, stasiun Asrama Haji, stasiun Punti Kayu, stasiun RSUD, stasiun Garuda Dempo, stasiun Demang, stasiun Bumi Sriwijaya, stasiun Dishub, stasiun Cindei, stasiun Ampera, stasiun Polresta, stasiun Jakabaring dan stasiun terakhir DJKA, 12 stasiun di antaranya telah beroperasi sejak 6 Oktober 2018. Setiap rangkaian kereta akan berhenti selama 1 menit di setiap stasiun, kecuali di setiap stasiun akhir perjalanan rangkaian kereta akan berhenti selama 10 menit. Tarif pembayaran naik LRT sendiri sebesar Rp 10.000 untuk jarak jauh dan Rp 5000 untuk jarak dekat.

Saat peneliti mencoba naik LRT, ternyata jumlah penumpang memang berbeda-beda setiap harinya, pada saat peneliti melakukan pengamatan penumpang terlihat sepi dan setelah berjalan ke stasiun-stasiun berikutnya mulai bertambah namun tidak mencapai kapasitas penuh masih

ada beberapa kursi yang tidak terisi oleh penumpang, seperti yang bisa di lihat pada gambar dibawah ini :

**Gambar 3.3**

**Suasana di Dalam Kereta LRT**



*Sumber : Dokumentasi peneliti, tanggal 23 September 2019*

**Gambar 3.4**

**Suasana di Dalam Kereta LRT**



*Sumber : Dokumentasi peneliti, 23 September 2019*

Dari beberapa gambar di atas menunjukkan masih kurangnya minat masyarakat dalam menggunakan transportasi umum seperti LRT, masyarakat masih perlu dihibau dan di arahkan agar mau menggunakan LRT sehingga kemacetanpun bisa berkurang, dan LRT juga bisa memberikan manfaat dan solusi bagi masyarakat namun saat ini memang masyarakat perlu di arahkan dan memang perlu proses agar masyarakat tersebut mulai mau menggunakan transportasi LRT.

Sebuah pembangunan seharusnya memiliki manfaat bagi orang banyak dan pembangunan LRT ini tujuan utamanya memang dibangun untuk menunjang suksesnya *event* olahraga *Asian Game* yang diselenggarakan di Kota Palembang dan Jakarta dengan harapan para atlet dan penonton pergi ke lokasi kegiatan olahraga yaitu Jakabaring terhindar dari kemacetan dan keterhambatan seperti yang telah disampaikan di atas oleh pak Rasyid selaku Kepala Sub. Bagian Persidangan.

Jangka panjangnya LRT dibangun di Kota Palembang untuk mengurangi kemacetan seperti yang disampaikan pak Wahidin selaku Kabid. Perkeretaapian dan Pengembangan, namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi dan lebih memilih menggunakan transportasi angkot, trans musid dan taksi online seperti grab dan gojek untuk bepergian dikarenakan ada tempat-tempat tertentu yang tidak ada stasiun pemberhentian maka dari itu sebagian masyarakat lebih memilih

kendaraan pribadi yang lebih praktis dan tidak menyusahkan. Seperti yang disampaikan Ibu Leni yang pada saat itu sedang menaiki LRT sebagai berikut:

*“Biasanya saya naik ojek online untuk pulang pergi dari tempat kerja kalau tidak membawa motor, berhubung teman-teman mau mencoba naik LRT jadi saya ikut, nanti berhenti di stasiun terdekat di RSUD tetapi masih perlu jalan kaki untuk sampai ke tujuan, jadi memang saya lebih suka bawa motor sendiri dari pada naik transportasi umum karena lebih cepat dan mudah.”<sup>10</sup>*

Pembangunan LRT kurang lebih memakan waktu selama 2 (dua) tahun dan pengerjaannya dilakukan secara bertahap, banyak sekali kendala yang dihadapi dalam proses pembangunan proyek LRT ini jika kita lihat 2 (dua) tahun kebelakang kondisi lalu lintas di sekitar pembangunan LRT terlihat sangat rumit dan banyak sekali alat-alat berat yang memakan badan jalan.

Selama proses pembangunannya LRT menyebabkan terjadi kemacetan yang teramat panjang karena adanya penyempitan badan jalan yang membuat kondisi kendaraan tidak berjalan seperti biasanya. Kemacetan

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ibu Leni Pegawai Swasta, di dalam LRT, tanggal 23 September 2019

tidak hanya membuat masyarakat menjadi terlambat beraktivitas tetapi juga mengganggu kenyamanan dalam berkendara khususnya pejalan kaki.

**Gambar 3.5**

**Kemacetan yang Terjadi di Jembatan Ampera**



*Sumber: Internet, diakses pada 19 September 2019*

**Gambar 3.6**

**Kemacetan yang Terjadi di Sekitar Jembatan Ampera**



*Sumber: Internet, diakses pada 19 September 2019*

**Gambar 3.7**  
**Kemacetan di Kota Palembang**



*Sumber: Internet, diakses pada 19 September 2019*

Selain kemacetan proses pembangunan proyek LRT juga banyak merugikan kelompok-kelompok tertentu seperti Perusahaan-perusahaan papan reklame mereka sangat dirugikan dengan adanya pembangunan LRT ini karena papa-papan reklame yang sudah terpasang terpaksa harus dilepas dan diturunkan karena adanya pembangunan proyek LRT disepanjang jalan Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II menuju ke Jakabaring dan ada pula sebagian tanah masyarakat yang harus digusur untuk pembangunan proyek LRT ini. seharusnya proses pembangunan tidak menimbulkan dampak negatif secara ekonomi bagi seluruh pihak terkait.

Berbagai keluhan masyarakat dan Perusahaan papan reklame yang merasa dirugikan sempat mendatangi DPRD Provinsi untuk menyuarakan hak-hak mereka di DPRD, mereka meminta ganti rugi dan keadilan terkait pembangunan LRT yang banyak memberikan dampak kerugian baik materi maupun kenyamanan akibat macet yang berkepanjangan. Belum lagi ada beberapa taman-taman kota yang dihancurkan untuk pembangun proyek LRT ini, Pihak DPRD menyampaikan dalam hal ini diwakili oleh pak Rasyid mengatakan bahwa :

*“Terkait keluhan-keluhan masyarakat dan Perusahaan papan reklame memang sempat mendatangi kantor DPRD mereka meminta ganti rugi atas kerugian financial yang diakibat oleh pembangunan proyek LRT, dan pemerintah sudah mengganti rugi kepada pihak-pihak yang dirugikan dan untuk papan reklame yang dilepas juga pemerintah sudah memberi izin memasang ditempat lain dan juga sudah di ganti rugi, dan taman-taman kota juga kan punya pemerintah jadi tidak masalah jika harus di hancurkan untuk kelancaran pembangunan LRT”.*<sup>11</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, pembangunan yang dilakukan pemerintah harus melewati perencanaan yang matang dan proses pembangunan harus mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak dan dengan menjunjung tinggi penerapan nilai-nilai berbangsa dan bernegara khususnya sila ke-5 Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Abdullah Rasyid., SH, M.Si Kepala Sub Bagian Persidangan, Tanggal 02 September 2019, Pukul 09.29 WIB di Jalan Kapten A. Rivai Palembang

Terkait pembangunan LRT yang menyebabkan masalah kemacetan saat pembangunan tersebut, masyarakat banyak yang kesulitan karena harus mencari jalan alternatif sendiri untuk menghindari kemacetan bahkan harus mencari jalan tikus untuk kelancaran aktivitas mereka sehari-hari, dan tentu disini pemerintah seharusnya memberikan solusi bagi masyarakat terkait kemacetan yang ditimbulkan oleh pembanguna LRT ini.

Adapun keluhan dari masyarakat terkait kemacetan yang disampaikan Kasubag. Persidangan Bapak Abdullah Rasyid sebagai berikut :

“kemacetan memang terjadi saat pembangunan LRT berlangsung, untuk solusi mungkin ada, dari Dinas Perhubungan karena mereka yang membuat solusi atau memberikan arahan kepada masyarakat.”<sup>12</sup>

Macet panjang yang tidak ada habisnya yang ditimbulkan oleh pembangunan proyek LRT ini selalu memberikan ketidak nyamanan bagi masyarakat dan pembangunan ini juga menyebabkan timbulnya polusi udara. Bahkan masyarakat sampai harus mencari jalan sendiri jalan tikus sebagai alternatif menghindari kemacetan dan ini berlangsung selama 2 (dua) tahun pembangunan proyek LRT, terkait jalan ada atau tidak solusi yang diberikan oleh pemerintah khususnya Dinas Perhubungan untuk mengurangi kemacetan begini tanggapan Bapak Ahmad Wahidin Kabid. Perkeretaapian dan Pengembangan :

---

<sup>12</sup>Wawancara dengan Bapak Abdullah Rasyid., SH, M.Si Kepala Bagian Persidangan, tanggal 02 September 2019, pukul 09.29 WIB, di kantor DPRD Sumatera Selatan, di Jalan Kapten A.Rivai Palembang

*“Pembangunan ini pasti menyebabkan kemacetan itu sudah pasti dan ini adalah pengorbanan untuk kedepannya, anak-cucu kita nanti yang akan menikmati manfaatnya, yang namanya pembangunan di Kota sudah pasti menyebabkan kemacetan itu sudah resiko, untuk solusi tidak ada solusi yang dilakukan untuk menghindari kemacetan masyarakat hanya dihimbau untuk mendukung pembangunan ini karena nanti setelah selesai kita semua yang akan menikmati manfaatnya”.*<sup>13</sup>

Pada saat pembangunan proyek LRT kemacetan adalah hal yang wajar karena pembangunan ini berada di tengah kota apalagi tepatnya di jalan raya jadi tidak ada hal dapat kita hindari selain mendukung pembangunan pemerintah tersebut karena nantinya jika bangunan kereta ini selesai kita semua yang akan menikmati hasilnya, begitulah penyampaian Kabid Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.

Namun pemerintah juga perlu memikirkan masyarakat yang terkena dampak dari pembangunan ini dan seharusnya pada saat pembangunan LRT berlangsung ada solusi yang diberikan oleh pemerintah Kota Palembang khususnya Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan seperti jalur tambahan atau jalan alternatif dan sebagainya agar kemacetan tidak begitu parah.

## **B. Pembahasan**

### **1. Partisipasi Masyarakat Ditinjau Dari Demokrasi Deliberatif**

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan Ahmad Wahidin, SST., ST, MT Kabid Perkeretaapian dan Pengembangan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 16 September 2019, pukul 09.00 WIB, di kantor Dinas Perhubungan , di Jalan Kapten A.Rivai Palembang

Sebuah pembangunan adalah hasil dari kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yang memiliki tujuan dan manfaat bagi masyarakat, pembangunan yang sudah diputuskan tersebut pasti sudah melalui pertimbangan yang sangat matang dan terencana.

Begitu juga dengan pembangunan proyek LRT di Kota Palembang pasti sudah melalui proses perencanaan yang matang. Peneliti akan menganalisis proses pembangunan proyek LRT mengenai keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan dan keputusan pemerintah dalam memutuskan proyek LRT ditinjau dari demokrasi deliberatif.

Didalam demokrasi deliberatif, yang berarti kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah harus melibatkan dan mengikutsertakan masyarakat didalamnya dan kepentingan masyarakat yang menjadi dasar dari kebijakan itu. Setiap kebijakan harus berasal dari diskusi publik yang dimusyawarahkan oleh masyarakat dan yang terpenting hasil dari kebijakan itu adalah kehendak masyarakat.

Seperti dalam teori demokrasi deliberatif negara bisa disebut berdaulat apabila sistem pada lembaga eksekutif, legistalif, dan yudikatif itu tersambung secara diskursus terhadap pembentukan aspirasi dan opini didalam ruang publik. Teori demokrasi deliberatif tidak menganjurkan sebuah revolusi, melainkan suatu reformasi negara hukum dengan

melancarkan kegiatan diskursus publik di berbagai bidang sosial-politis-kultur untuk meningkatkan partisipasi demokratis warga negara.<sup>14</sup>

Keputusan dan kebijakan yang dibuat pemerintah itu tersambung dan terhubung kepada masyarakat secara langsung melalui ruang publik, dan masyarakat mempunyai akses dalam mempengaruhi keputusan pemerintah, sehingga kebijakan yang diambil sesuai dengan keinginan dan cita-cita masyarakat itu sendiri. Pembangunan LRT keputusannya diambil untuk sebuah kepentingan bersama dalam hal ini untuk kepentingan hubungan kerja sama antar negara dalam kegiatan olahraga yaitu Pesta Olahraga se-Asia yang ke-18 tahun 2018.

Dari hasil wawancara antara peneliti dengan Bapak Abdullah Rasyid, Kasubag. Persidangan DPRD Sumatera Selatan di atas, bahwa pembangunan proyek LRT tidak melibatkan secara langsung masyarakat umum dikalangan menengah kebawah, maka ditinjau dari demokrasi deliberatif proses pembangunannya sudah melibatkan masyarakat umum tetapi masih terbatas.

Indonesia tidak memakai sistem demokrasi yang mengharuskan warga negaranya terlibat secara langsung atau harus melapor terlebih dahulu kepada rakyat terkait pembangunan yang akan dibangun pemerintah pusat ataupun daerah, sebaliknya Indonesia memakai sistem

---

<sup>14</sup>Taufiq Rahmat,(2012) *Jurgen Habermas :Demokrasi Deliberatif dan RuangPublik*. Vol.03, No.1

demokrasi yang diwakilkan melalui wakil-wakilnya baik di eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Dari penyampaian informan di atas yaitu Bapak Abdullah Rasyid selaku Kepala Sub Bagian Persidangan DPRD Provinsi Sumatera Selatan, juga diperoleh keterangan bahwa; kebijakan pemerintah dalam memutuskan LRT yang akan dibangun di Kota Palembang, tidak diketahui oleh masyarakat secara langsung dari pemerintah, tetapi melalui berita dan media-media yang memberitakan bahwa di Kota Palembang akan dibangun sebuah kereta *Lihg Rail Transit*.

Dari hasil wawancara tersebut peneliti mendapatkan keterangan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pemutusan proyek LRT di Kota Palembang secara langsung itu sudah ada tetapi masih terbatas, karena tidak mungkin Gubernur akan mengundang seluruh masyarakat Kota Palembang untuk datang ke kantor Gubernur sudah pasti tidak akan cukup tempat, namun hanya tokoh-tokoh masyarakat saja yang di beritahu mengenai pembangunan proyek LRT ini, dan juga LRT adalah proyek pusat yang sifatnya nasional dan biaya penganggarannya dari APBN pusat.

Jadi keikutsertaan masyarakat seperti yang ada di dalam demokrasi deliberatif bahwa masyarakat mempunyai kebebasan dan hak dalam memutuskan kebijakan yang akan diputuskan pemerintah, tidak sama dengan kebijakan yang ada dalam proses pembangunan LRT, karena

Indonesia sendiri tidak menganut demokrasi deliberatif yang melibatkan rakyat secara langsung.

Indonesia menganut sistem demokrasi perwakilan atau wakil rakyat yaitu DPR, dalam pembangunan proyek LRT keputusan yang dibuat oleh pemerintah itu murni keputusan pemerintah pusat sendiri untuk mengsucceskan kegiatan *Asian Game* 2018. Keputusan pemerintah dalam membangun proyek LRT harus memberikan manfaat dan solusi untuk Kota Palembang karena saat ini masyarakat Kota Palembang sangat membutuhkan infrastruktur yang dapat mengurangi kemacetan yang semakin hari semakin parah, termasuk proyek LRT juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Palembang, dan keputusan pemerintah dalam membangun proyek LRT ini pasti sudah melalui tahapan perencanaan.

Dengan adanya pembangunan proyek LRT ini diharapkan dapat memindahkan masyarakat Kota Palembang dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum dengan harapan agar kemacetan di kota Palembang bisa berkurang.

Bagi yang hendak pergi dari Bandara menuju ke Jakabaring dan sebaliknya, sangat efektif dan efisien menggunakan LRT, karena akan terhindar dari kemacetan. Namun bagi orang yang hendak pergi ke kantor atau ke toko-toko tertentu perjalanannya harus diteruskan menggunakan transportasi lain, karena stasiun *Light Rail Transit* ini pemberhentiannya

tidak mencapai tempat-tempat keramaian tersebut, karena stasiun LRT yang terbatas. Stasiun pemberhentian LRT hanya di tempat-tempat tertentu saja seperti Rumah Sakit, JSC (*Jakabaring Sprot City*), dan Ampera yang tentunya menyusahkan para penumpang dari stasiun awal sampai ke stasiun pemberhentian. Masyarakat cenderung kerepotan karena harus naik kendaraan lagi untuk sampai ketujuan mereka karena itulah mereka lebih suka menggunakan kendaraan pribadi ataupun naik Bus saja.

Setelah peneliti melakukan penelitian terhadap pembangunan proyek LRT, jika keterlibatan masyarakat ditinjau dari demokrasi deliberatif maka masyarakat mempunyai hak untuk terlibat langsung sebagai pihak yang memberi saran dan membuat keputusan hingga pelaksanaan pembangunan proyek tersebut selesai. Tetapi karena Indonesia melaksanakan demokrasi perwakilan maka keterlibatan masyarakat secara langsung dikalangan menengah kebawah sangat terbatas. Kedua sistem demokrasi tersebut terdapat perbedaan yang sangat besar dimana pembangunan LRT di Kota Palembang tidak bisa disamakan dengan pembangunan yang ada dalam demokrasi deliberatif karena Indonesia sendiri tidak menganut sistem demokrasi deliberatif, keterlibatkan dan keikut sertakan masyarakat dalam memutuskan kebijakan pembangunan LRT itu diwakilkan oleh wakil rakyat yaitu DPRD.

## **2. Proses Pembangunan Proyek LRT di Kota Palembang Dalam Perspektif Demokrasi Deliberatif**

Pembangunan merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam perkembangan suatu negara. Salah satu bentuk pembangunan dapat dilakukan dalam infrastruktur, dimana seperti dinyatakan Grigg dalam Kodoatie (2005) infrastruktur merupakan pendukung utama sistem-sistem utama dalam sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari, infrastruktur itu berupa fasilitas fisik yang di butuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkungan sosial dan ekonomi.<sup>15</sup>

Perencanaan yang matang sangat diperlukan dalam sebuah pembangunan proyek seperti didalam manajemen proyek ada yang namanya fungsi perencanaan (*Planning*). Pada umumnya perencanaan (*planning*) berupa tindakan pengambilan keputusan yang mengandung data dan informasi, ataupun fakta kegiatan yang akan dipilih dan akan dilakukan pada masa mendatang.

Tindakan perencanaan meliputi :

1. Menetapkan tujuan dan sasaran proyek;
2. Menganalisis kendala dan resiko yang mungkin terjadi untuk seluruh proyek ataupun per bagian dari rencana;

---

<sup>15</sup> Indrianto Roberto Ramadani, *Koordinasi Dalam Pembangunan Infrastruktur Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Volume 5, Nomor 1, Tahun 2017

3. Menetapkan penggunaan sumber daya;
4. Menyusun rencana induk jangka panjang dan jangka pendek;
5. Menyumbangkan strategi dan prosedur operasi;
6. Menyiapkan pendanaan serta standar kualitas yang diharapkan;
7. Menentukan metode dan aspek-aspek teknik yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.<sup>16</sup>

Manfaat fungsi perencanaan tersebut adalah sebagai alat pengawas ataupun pengendali kegiatan, ataupun pedoman pelaksana kegiatan, serta sarana untuk memilih dan menetapkan kegiatan yang diperlukan. Secara fungsional, perencanaan dalam manajemen proyek, antara lain :

1. Menentukan sasaran proyek tersebut (sesuai dengan tahapan proyek);
2. Menentukan kendala dan kepentingan relatif dari tiap-tiap kendala;
3. Menentukan cara/metode yang mungkin ada;
4. Sumber daya proyek yang tersedia;
5. Telaah kembali yang layak untuk mencapai sasaran.<sup>17</sup>

Dalam sebuah pembangunan perlu adanya pengendalian program pembangunan, pengendalian adalah suatu proses untuk mengarahkan

---

<sup>16</sup>H.A. Dimiyati Hamdan, Nurjaman kadar. (2014). *Manajemen Proyek*, Bandung : CV Pustaka Setia, Cet, 1. Hlm. 27

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 28

kegiatan menuju ke sasaran yang telah ditentukan. Begitu juga dengan LRT perlu adanya pengendalian agar beroperasi sesuai sasaran yang telah ditentukan. Selain pengendalian, pengawasan dari masyarakat juga diperlukan dalam sebuah pembangunan, pengawasan ini berupa masukan pemikiran dan saran kepada aparat pemerintah baik secara lisan maupun tertulis yang bertujuan untuk perbaikan.<sup>18</sup>

Pembangunan LRT dibangun pada akhir November 2015 dan ditargetkan selesai pada 2018 sebelum waktu pelaksanaan *Asian Game* dimulai, pada tahap awal pembangunan LRT membangun tiang pancang yang tinggi sebagai pondasi dari bangunan tersebut, tiang-tiang ini dibangun dari bandara ke jakabaring, tiang ini dibangun dibawah tanah agar lalu lintas tidak terhambat, pembangunan bertahap mulai dilakukan dengan memasang jalur-jalur kereta yang sudah dirangkai. Pada Desember 2017 pengerjaan LRT sudah mencapai ke pemasangan stasiun LRT dan pier diberbagai stasiun pemberhentian.<sup>19</sup>

Pembangunan prasarana LRT Palembang selesai pada Februari 2018. Serangkaian uji coba dilaksanakan sejak Mei hingga Juli 2018, termasuk uji coba terbatas dengan penumpang pada 23-31 Juli 2018. Operasi penuh

---

<sup>18</sup> Kunarjo. (2002). *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*, Jakarta : UI Press, hlm.227 dan 255

<sup>19</sup><http://finance.detik.com/infrastruktur/d-4085159/fakta-seputsr-lrt-dibangun-pakai-tiang-ptiang-tinggi> diakses pada 18 Oktober 2019 , pukul 19.19 WIB

LRT Palembang dimulai pada 1 Agustus 2018, dengan 6 stasiun prioritas dibuka untuk melayani penumpang dari dan menuju tempat pertandingan Pesta Olahraga Asia 2018.<sup>20</sup>

LRT mulai beroperasi penuh pada 1 Agustus 2018 dan untuk teknisi LRT sendiri mempunyai panjang sistem sepanjang 24,5 km dengan satu jalur dan 13 stasiun pemberhentian, dan untuk keretanya sendiri memiliki panjang (termasuk alat perangkai) MC1, MC2 = ± 17.000 mm dan lebar badan kereta 2.650 mm (3 ft 6 in), dengan kecepatan rata-rata 40 km/h (25 mph) dan kecepatan tertinggi 80 km/h (50 mph).<sup>21</sup>

**Tabel 3.2**  
**Spesifikasi Teknis Umum**

<b>Resume Spesifikasi Teknis</b>	
<b>Axle Load</b>	Maks. 12 ton
<b>Material</b>	Aluminum alloy, untuk cover bagian depan/kabin menggunakan komposit
<b>Window</b>	Frame aluminium, serta kaca jenis tempered
<b>Wheel Gauge</b>	1.067 mm
<b>Design Speed</b>	100 km/jam
<b>Operasional Speed</b>	Maks. 85 km/jam
<b>Minimum Radius (Main Line /</b>	80/60 m

---

<sup>20</sup> *Op. cit*

<sup>21</sup> *Op. Cit*

<b>Depot)</b>	
<b>Max. Gradient (Main Line / Depot)</b>	20 % / 35 %
<b>Power Supply</b>	750 Vdc (Range voltage 500 – 900 VDC) menggunakan Rel Ketiga (Third Rail)
<b>Propulsion System</b>	Variable Voltage Variabel Frequency (VVVF) dgn Traction Inverter (IGBT) dan Traction Motor
<b>Brake System</b>	Menggunakan rem gesek dan elektrik, electro-pneumatic dan dynamic
<b>Bogie Suspension</b>	Rubber spring (primer) dan Air spring (sekunder)

Sumber : Dinas Perhubungan Sumatera Selatan

Hingga Agustus 2018, sebanyak delapan rangkaian kereta ringan yang diproduksi PT Industri Kereta Api tiba di Palembang sejak April 2018, masing-masing rangkaian kereta terdiri dari tiga gerbong. Setiap rangkaian kereta mampu mengangkut hingga 722 penumpang: 231 penumpang di gerbong pertama dan ketiga, dan 260 orang di gerbong kedua. Sementara, kapasitas tempat duduk sebanyak 78 penumpang. Rangkaian kereta dapat mengangkut penumpang dari Bandara SMB II menuju Jakabaring dengan waktu tempuh sekitar 30-45 menit.<sup>22</sup>

<sup>22</sup> Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, diperoleh tanggal

Kereta ini memiliki sistem daya kelistrikan 750 V DC dengan aliran listrik rel ketiga. Setiap rangkaian yang diproduksi PT Industri Kereta Api di Madiun terbuat dari aluminium, dengan dimensi tinggi rangkaian 3.700 mm, tinggi lantai kereta 1.025 mm, jarak antar bogie 11.500 mm, dan panjang setiap rangkaian kereta dengan tiga gerbong sepanjang 51800 milimeter (169,9 ft). Bahan pembuat rangkaian kereta yang diproduksi PT Industri Kereta Api sebagian besar sudah berasal dari material dalam negeri.<sup>23</sup>

LRT merupakan fasilitas umum yang dibangun pemerintah selain untuk menunjang kesuksesan *Asian Game* 2018 adalah untuk kebutuhan masyarakat Kota Palembang sebagai alternatif atau solusi mengatasi kemacetan yang ada di Kota Palembang.

Pembangunan proyek LRT di Kota Palembang akan diteliti dan dianalisis menggunakan teori demokrasi deliberatif yang akan dihubungkan dengan ruang publik. Dimana didalam demokrasi deliberatif ingin meningkatkan intensitas partisipasi warga negara dalam proses pembentukan aspirasi dan opini agar kebijakan-kebijakan dan undang-undang yang dihasilkan oleh pihak yang memerintah semakin mendekati harapan pihak yang diperintah, untuk merealisasikan hal tersebut dibutuhkan sebuah ruang yaitu ruang publik yang digunakan untuk

---

<sup>23</sup> *Ibid*

mendiskusikan berbagai masalah termasuk pembangunan infrastruktur LRT, pembangunan ini seharusnya melibatkan diskusi publik yang ditampung dalam ruang publik.

Setelah menganalisis pembangunan proyek LRT peneliti memperoleh informasi bahwa proses pembangunan proyek LRT di Kota Palembang sudah melalui tahap-tahap pembangunan proyek dimana didalam tahapan tersebut memiliki 7 (tujuh) tahap yaitu tahap peninjauan, tahap *pre-feasibility study*, tahap *feasibility study*, tahap pengusulan, tahap persiapan pelaksanaan proyek, tahap desain, dan tahap pelaksanaan.

Ditinjau dari demokrasi deliberatif proses pembangunan proyek LRT menunjukan ada kesamaan dalam sistem pembangunan yaitu mengikuti prosedur dan aturan dalam pembangunan, meskipun dalam pembangunannya tidak dimusyawarahkan secara langsung dengan masyarakat umum tetapi melalui wakil rakyat yaitu DPR.

Keputusan yang diambil pemerintah dalam membangun proyek LRT di kota Palembang itu keputusan yang dibuat oleh pemerintah pusat untuk melancarkan kegiatan *Asian Game* sekaligus keputusan Bapak H. Alex Noerdin selaku Gubernur Sumatera Selatan yang menyanggupi pembangunan LRT di Kota Palembang, sebagai alat transportasi massal yang menjadi pendukung kesuksesan dan kelancaran kegiatan *Asian Game* 2018.

Masalah yang ada pada saat pembangunan proyek LRT di Kota Palembang yaitu masalah kemacetan yang begitu parah, pemerintah Kota selaku pihak yang membangun LRT di Kota Palembang khususnya Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan tidak memberikan solusi, jalan alternatif, rambu-rambu ataupun arahan kepada masyarakat Kota Palembang terkait kemacetan yang dialami oleh masyarakat.

Maka dari itu setelah melakukan penelitian dan analisis menggunakan teori demokrasi delibertaif peneliti mendapatkan informasi bahwa proses pembangunan proyek LRT di Kota Palembang untuk saat ini memang belum mempunyai manfaat yang efisien tetapi kedepannya akan sangat memberikan manfaat yaitu mengatasi kemacetan, sedangkan tujuan pembnagunanya memang secara konkrit untuk menunjang kesuksesan *Asian Game 2018*, sedangkan dampak dari pembangunan ini adalah kamacetan parah pada saat proses pembangunan, dan pada saat terjadi kemacetan seharusnya pemerintah memberikan solusi kepada masyarakat melalui kerja sama antara Dinas Perhubungan dan Satpolantas Kota Palembang untuk mengatasi kemacetan seperti jalur alternatif atau jalur satu arah (*one way*).